

TESIS

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

(STUDI KASUS NOMOR : 61/Pid C/2022/PN Padang dan 79/Pid C/2022/PN Padang)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)



Disusun Oleh:

Zaifi Surya Gemilang

2120112024

Dosen pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Khairani, S.H., M.H**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2023

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT**
(STUDI KASUS NOMOR : 61/Pid C/2022/PN Padang dan 79/Pid C/2022/PN Padang)
(Zaifi Surya Gemilang, 2120112024, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 2023, 116 Halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dilakukan oleh pekerja/tenaga kerja, pengusaha, atau pihak lain di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP, Undang-undang Ketenagakerjaan, dan/atau Undang-Undang lainnya, baik yang dilakukan sendiri sendiri maupun bersama-sama. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam KUHAP dan juga sesuai dengan manajemen penyidikan yang ada pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Disnakertrans juga berkoordinasi dengan kepolisian. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tidak berjalan efektif merupakan salah satu masalah yang membuat penyidikan tidak berjalan optimal. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat? 2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera barat? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan oleh PPNS Disnakertrans dalam dua kasus yang terjadi terlaksana sesuai dengan kewenangan yang dimiliki PPNS meskipun kurang optimal karena kurangnya koordinasi dengan Kepolisian selaku Korwas. 2. Hambatan yang dialami PPNS Disnakertrans dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah kurangnya sarana dan prasarana menjadi hambatan dalam penyidikan. SOP yang tidak dijalankan sepenuhnya dan kurangnya koordinasi antara PPNS dan Kepolisian selaku Korwas merupakan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Untuk pelaksanaan penyidikan yang lebih baik, PPNS Disnakertrans Sumbar harus bisa meningkatkan koordinasi dengan Penyidik Polri. Selain itu, Disnakertrans diharapkan mampu mengatasi hambatan internal agar penegakan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan bisa berjalan lebih baik lagi.

Kata kunci: Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Bidang Ketenagakerjaan

**INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTS IN THE EMPLOYMENT SECTOR BY
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) OF MANPOWER AND
TRANSMIGRATION OFFICE OF WEST SUMATRA PROVINCE
(CASE STUDY NUMBER : 61/Pid C/2022/PN Padang dan 79/Pid C/2022/PN Padang)
(Zaifi Surya Gemilang, 2120112024, Andalas University Faculty of Law Postgraduate
Program, 2023, 116 Pages)**

ABSTRACT

Criminal acts in the field of labor an act that is prohibited by a legal rule by workers/labor, employers, or other parties outside the company who are threatened with criminal sanctions based on the Criminal Code, Manpower Law, and/or other laws, either alone or together. In the implementation of criminal investigations in the field of labor by Civil Servant Investigators. Civil Servant Investigators of the Manpower and Transmigration Service (Disnakertrans) are carried out based on the authority contained in KUHAP and also in accordance with the investigation management in the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2010 concerning Investigation Management by Civil Servant Investigators (PPNS). In this case, it can be understood that the investigation carried out by PPNS Disnakertrans is also coordinated with the police. In its implementation, coordination is not running effectively is one of the problems that makes the investigation not run optimally. Based on the background of the problems described above, the problems studied can be formulated, namely: 1. How is the implementation of criminal investigations in the field of labor by Civil Servant Investigators (PPNS) of the Manpower and Transmigration Office of West Sumatra Province? 2. What are the obstacles in the implementation of criminal investigations in the field of labor by Civil Servant Investigators (PPNS) of the Manpower and Transmigration Office of West Sumatra Province? This research uses an empirical juridical approach, is descriptive, from the results of the study it can be seen that: 1. The implementation of investigations into criminal acts in the field of employment by the PPNS Disnakertrans in the two cases that occurred was carried out in accordance with the authority possessed by the PPNS, although it was less than optimal due to a lack of coordination with the Police as Korwas. 2. The obstacle experienced by PPNS Disnakertrans in carrying out investigations into criminal acts in the employment sector is that the lack of facilities and infrastructure is an obstacle in the investigation. SOPs that are not fully implemented and lack of coordination between PPNS and the Police as Korwas are obstacles found in carrying out investigations into criminal acts in the employment sector. For better implementation of investigations, PPNS Disnakertrans West Sumatra must be able to improve coordination with Police Investigators. In addition, Disnakertrans is expected to be able to overcome internal obstacles so that the enforcement of criminal acts in the labor sector can run even better.

Keywords: Investigation, Civil Servant Investigator, Crime, Employment Sector